

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA TAHUNAN 2023 (AUDITED)



kaltim.bawaslu.go.id



Jalan MT. Haryono No.
128, Samarinda



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 12 Mei 2024

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A
NIP. 19700527 199803 1 001

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	70
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	85
F. Pengungkapan Lainnya	94

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 12 Mei 2024

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf S.Si., M.A

NIP. 19700527 199803 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.245.397. Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp127.060.899.202 atau mencapai 84,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp150.121.775.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp128.580.812.048 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp124.951.956.154.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.614.175.894; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.680.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp72.487.726 dan Rp128.508.324.322.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.267.267 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp125.966.236.963 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp125.964.969.696. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp5.978.130 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp125.958.991.566.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.313.659.584 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp125.958.991.566, koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp7.786.894, dan koreksi lain-lain sebesar

Rp2.000.000, serta ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp251.163.443.198 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp128.508.324.322.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2023		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	7.245.397	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	7.245.397	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0
Jumlah Pendapatan		-	7.245.397	0
B. Belanja Negara	B.2			
I. Belanja Pemerintah Pusat		150.121.775.000	127.060.899.202	84,64
1. Belanja Pegawai	B.3	9.182.167.000	8.709.390.360	94,85
2. Belanja Barang	B.4	139.925.063.000	117.347.977.038	83,86
3. Belanja Modal	B.5	1.014.545.000	1.003.531.804	98,91
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0
8. Belanja Lain-lain		0	0	0
Jumlah Belanja Negara		150.121.775.000	127.060.899.202	84,64
C. Pembiayaan		0	0	0

II. NERACA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NERACA PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	52.771.349	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	122.776.223.044	
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.3	431.450.000	437.250.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	406.869.509	408.869.509
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(2.034.348)	(2.044.348)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.6	404.845.161	406.825.161
Persediaan	C.7	1.286.676.600	6.169.875
Jumlah Aset Lancar		124.951.956.154	850.245.036
Aset Tetap			
Tanah	C.8	562.424.000	0
Peralatan dan Mesin	C.9	11.521.222.293	9.870.201.196
Gedung dan Bangunan	C.10	895.705.000	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	30.500.000	30.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.12	199.033.900	199.033.900
Akumulasi Penyusutan	C.13	(9.594.709.299)	(7.673.355.256)
Jumlah Aset Tetap		3.614.175.894	2.426.379.840
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.14	438.664.000	294.339.000
Aset Lain-lain	C.15	0	872.801.940
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(423.984.000)	(1.105.009.849)
Jumlah Aset Lainnya		14.680.000	62.131.091
Jumlah Aset		128.580.812.048	3.338.755.967
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	19.681.877	25.096.383
Uang Muka dari KPPN	C.18	52.771.349	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	34.500	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.487.726	25.096.383
Jumlah Kewajiban		72.487.726	25.096.383
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	128.508.324.322	3.313.659.584
Jumlah Ekuitas		128.508.324.322	3.313.659.584
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		128.580.812.048	3.338.755.967

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
dan 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.267.267	120.547
Jumlah Pendapatan		1.267.267	120.547
Beban			
Beban Pegawai	D.2	8.698.974.660	9.340.898.880
Beban Persediaan	D.3	27.430.900	33.355.025
Beban Barang dan Jasa	D.4	67.005.614.996	21.369.424.378
Beban Pemeliharaan	D.5	1.875.870.407	979.909.171
Beban Perjalanan Dinas	D.6	47.175.374.700	15.220.571.451
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.182.981.300	1.347.248.640
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(10.000)	(37.500)
Jumlah Beban		125.966.236.963	48.291.370.045
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(125.964.969.696)	(48.291.249.498)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.978.130	8.133.289
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.978.130	8.133.289
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.978.130	8.133.289
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.9	5.978.130	8.133.289
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(125.958.991.566)	(48.283.116.209)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.11	(125.958.991.566)	(48.283.116.209)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
dan 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E.1	3.313.659.584	3.672.742.759
Surplus/Defisit LO	E.2	(125.958.991.566)	(48.283.116.209)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(9.786.894)	(7.500.000)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	(7.786.894)	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.2	(2.000.000)	(7.500.000)
Transaksi Antar Entitas	E.4	251.163.443.198	47.931.533.034
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	125.194.664.738	(359.083.175)
Ekuitas Akhir	E.6	128.508.324.322	3.313.659.584

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

*Dasar
Hukum dan
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola. memelihara. dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi. sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/ Aplikasi Komputer</i>	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2023 telah dilakukan 13 (tiga belas) kali revisi yaitu :

1. *Revisi ke-01, dengan tanggal revisi 22 Desember 2022;*
2. *Revisi ke-02, dengan tanggal revisi 25 Januari 2023;*
3. *Revisi ke-03, dengan tanggal revisi 06 Februari 2023;*
4. *Revisi ke-04, dengan tanggal revisi 10 April 2023;*
5. *Revisi ke-05, dengan tanggal revisi 21 Juni 2023;*
6. *Revisi ke-06, dengan tanggal revisi 21 Juli 2023;*
7. *Revisi ke-07, dengan tanggal revisi 15 September 2023;*
8. *Revisi ke-08, dengan tanggal revisi 20 September 2023;*
9. *Revisi ke-09, dengan tanggal revisi 06 Oktober 2023;*
10. *Revisi ke-10, dengan tanggal revisi 03 November 2023;*
11. *Revisi ke-11, dengan tanggal revisi 16 November 2023;*
12. *Revisi ke-12, dengan tanggal revisi 05 Desember 2023; dan*
13. *Revisi ke-13, dengan tanggal revisi 27 Desember 2023.*

Revisi anggaran sesuai Surat Sekretaris Jenderal nomor 578/PR.03.01/KI/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment/Pencadangan Anggaran*. Untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pencadangan Anggaran adalah sebesar Rp1.886.467.000.

Revisi anggaran ke-02 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran mengenai Pemecahan Pagu Kabupaten/Kota sekaligus Revisi Perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Perjalanan Dinas Verifikasi Faktual Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Supervisi PDK, Panwaslu Kecamatan, dan Tes Panitia Pemungutan Suara.

Revisi anggaran ke-03 merupakan revisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur untuk revisi halaman III DIPA, Revisi PKD, dan

Revisi Perekrutan Panwaslu Kecamatan untuk 2 kecamatan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Revisi anggaran ke-04 merupakan Revisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penambahan perjalanan dinas kabupaten/kota, Perubahan P.C ke CCTV, Rompi Gakkumdu kabupaten/kota, pergeseran kegiatan SDM, kegiatan evaluasi pengawasan, dan kegiatan peringatan ulang tahun Bawaslu yang ke-15.

Revisi anggaran ke-05 merupakan revisi DJA sesuai Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 1609.1/PR.03.01/K1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 untuk realokasi anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023, Pendaftaran, Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas, dan Belanja Modal.

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	8.480.489.000	8.480.489.000
Belanja Barang	106.601.656.000	103.675.316.000
Belanja Modal	922.500.000	1.033.500.000
Jumlah Belanja	116.004.645.000	113.189.305.000

Revisi anggaran ke-06 merupakan revisi DJA untuk penghapusan *Automatic Adjustment* pada belanja pegawai sebesar Rp812.147.000.

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	8.480.489.000	7.668.342.000
Belanja Barang	103.675.316.000	103.675.316.000
Belanja Modal	1.033.500.000	1.033.500.000
Jumlah Belanja	113.189.305.000	112.377.158.000

Revisi anggaran ke-07 merupakan revisi DJA untuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT) berupa honorarium Ad-Hoc sebesar Rp12.265.200.000 dan operasional Ad-Hoc sebesar Rp7.326.764.000.

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	7.668.342.000	7.668.342.000
Belanja Barang	103.675.316.000	123.267.280.000
Belanja Modal	1.033.500.000	1.033.500.000
Jumlah Belanja	112.377.158.000	131.969.122.000

Revisi anggaran ke-08 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran mengenai pecah pagu per kabupaten/kota sesuai sub komponen pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) honorarium Ad-Hoc dan operasional Ad-Hoc.

Revisi anggaran ke-09 merupakan revisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan gaji dan tunjangan kinerja PPPK dan revisi halaman III DIPA.

Revisi anggaran ke-10 merupakan revisi DJA untuk pemenuhan gaji dan ABT pada kegiatan tahapan kampanye, logistik, pelatihan saksi parpol, dan sosialisasi rekrutmen PTPS.

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	7.668.342.000	9.182.167.000
Belanja Barang	123.267.280.000	139.925.063.000
Belanja Modal	1.033.500.000	1.014.545.000
Jumlah Belanja	131.969.122.000	150.121.775.000

Revisi anggaran ke-11 merupakan revisi Kanwil DJPb Provinsi

Kalimantan Timur untuk pengembangan website dan pengadaan laptop komisioner.

Revisi anggaran ke-12 merupakan revisi KPA terkait pemenuhan kebutuhan kabupaten/kota dalam memfasilitasi tahapan Pemilu 2024.

Revisi anggaran ke-13 merupakan revisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur untuk pemutakhiran revisi akhir dan penyelesaian pagu minus.

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi
Pendapatan
Rp7.245.397*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.245.397. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan jasa giro dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.267.267	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	552.088	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.426.042	-
Jumlah	-	7.245.397	-

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.267.267 merupakan pendapatan jasa giro rekening dana pemilu yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
--------	---------------	------	--------------

Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Februari 2023	27/03/2023	431EE48VV5A6E340	17.469
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Maret 2023	29/03/2023	DA28348VV5A8L0LU	147.846
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Februari 2023	24/03/2023	5C77B1JNFLIU6DMR	27.416
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kota Bontang Bulan Maret 2023	21/07/2023	AD19B61QUQQK7Q24	7.595
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Februari s.d. Maret 2023	26/09/2023	9F7F93CIFB9KBPQH	343.416
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Paser Bulan Februari s.d Maret 2023	26/09/2023	EB7417QLUG5IANHE	38.147
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Bulan Maret 2023	25/09/2023	02BC28N3EANUPC73	40.163
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Berau periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7BD021JNFMDUV89T	184.484

Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kota Bontang periode Februari s.d. November 2023	29/12/2023	6408C8N3EB1021FR	3.384
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Kutai Barat periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7AF9C0N9VRRII9O4	347.219
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Kutai Kartanegara periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	4E1398N3EB114JT3	59.763
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Paser periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	6A8167QLUGEJLJL0	50.365
Total			1.267.267

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp552.088 terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2022	27/07/2023	594FD3CIFB3MK00R	Rp351.200
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	473FF2G4VGHA6VI4	Rp200.088
Total				Rp552.088

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp5.426.042 terdiri dari setor kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2022 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
1.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Putusan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 15 September 2022	09/02/2023	A2A1F1JNFFVA3D	57.500
2.	Pengembalian Kelebihan Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 22 September 2022	09/02/2023	CE16E8N3EA2J7AE9	72.500
3.	Pengembalian Perjadi dalam rangka Memberikan Sambutan Pelantikan Panwaslu se-Kabupaten Berau tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	8DFF50N9VQQB9TOO	300.000
4.	Pengembalian Perjadi dalam rangka Rapat Evaluasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 di Manado a.n. Wamustofa Hamzah	17/01/2023	337016U8EKR253RB	555.500
5.	Pengembalian Perjadi dalam rangka Monitoring Tahap Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di PPU tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	C3CD57QLUFDEHVI6	787.000

6.	Pengembalian Perjadin Menghadiri Undangan RI tanggal 28 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Galeh Akbar Tanjung	17/01/2023	9D66855DEVM9B063	328.542
7.	Pengembalian Perjadin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 29 Desember 2022 a.n. Anna Siswanti Rahayu	17/01/2023	6F4573CIFAHGH4DL	399.700
8.	Pengembalian Perjadin Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 17 s.d. 20 November 2022 a.n. Akhmad Rifani	17/01/2023	48F7B8N3E9VQUEV9	135.000
9.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Nadirah	17/01/2023	5DA6161QUQ8LNB5U	15.000
10.	Pengembalian Uang Perjadin TUP 2 Tahun 2022 a.n. AIPTU M. Daud (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	7CCA62G4VVFV43AC6	1.280.000
11.	Pengembalian Perjadin LS TA. 2022 a.n. Muhtar Kusuma Atmaja (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	812D96U8EKR2529B	250.000

12.	Pengembalian Insentif Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	4FD096U8ELD87U9B	157.300
13.	Pengembalian Tahap 5 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	13/09/2023	D895648VV5RKVGBA	1.088.000
Total				5.426.042

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan 12,22% dibandingkan 31 Desember 2022. Penurunan terjadi dikarenakan Penerimaan Kembali atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu di TA 2023 lebih kecil dibandingkan dengan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.267.267	120.547	951,26
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	552.088	41	1346456,10
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.426.042	8.133.248	(33,29)
Jumlah	7.245.397	8.253.836	(12,22)

*Realisasi Belanja
Negara
Rp127.060.899.202*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp127.060.899.202 atau 84,64% dari anggaran belanja sebesar Rp150.121.775.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	9.182.167.000	8.709.390.360	94,85
Belanja Barang	139.925.063.000	117.347.977.038	83,86
Belanja Modal	1.014.545.000	1.003.531.804	98,91
Total Belanja Kotor	150.121.775.000	127.060.899.202	84,64
Jumlah	150.121.775.000	127.060.899.202	84,64

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, realisasi belanja Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 164,33% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada belanja barang yaitu sebesar 209,86% dibanding tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya Dana Tahapan Pemilu Ad Hoc yang disalurkan melalui Rekening Dana Pemilu sampai dengan triwulan IV tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat dana tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	8.709.390.360	9.333.640.366	(6,69)
Belanja Barang	117.347.977.038	37.871.778.665	209,86
Belanja Modal	1.003.531.804	864.106.740	16,14
Jumlah	127.060.899.202	48.069.525.771	164,33

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp8.709.390.360*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.709.390.360 dan Rp9.333.640.366. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 6,69%

dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan belanja pegawai disebabkan oleh adanya:

1. Terdapat pegawai yang dimutasi ke unit kerja lain; dan
2. Terdapat pengembalian pegawai Pemda yang dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Perbandingan Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.436.387.046	1.627.707.242	
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	6.063.664.400	6.588.591.000	
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	34.997.080		
Belanja Lembur	36.817.000	34.509.000	
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.139.464.406	1.092.936.580	
Jumlah Belanja Kotor	8.711.329.932	9.343.743.822	
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.939.572)	(10.103.456)	
Jumlah Belanja	8.709.390.360	9.333.640.366	

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.709.390.360 dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS, CPNS, dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2023;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional bulan Januari s.d. Desember 2023;
3. Pembayaran uang makan PNS, CPNS, dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2023;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bulan Januari s.d. Desember 2023;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2023;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS, CPNS, PPPK bulan Januari s.d. Desember 2023;
7. Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS dan CPNS Tahun 2023;

8. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023;
9. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi tahun 2023.

*Realisasi Belanja
Barang
Rp117.347.977.038*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp117.347.977.038 dan Rp37.871.778.665. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 209,86% dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022. Kenaikan paling signifikan terjadi pada Belanja Barang Non Operasional yaitu sebesar 1685,5%, hal tersebut karena belanja honor output kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan pada belanja honor output kegiatan dikarenakan terdapat realisasi honorarium pokja antara lain honorarium pokja Gakkumdu yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, honorarium pokja rekrutmen panwascam, dan adanya realisasi honorarium pokja PPID pada Bawaslu Kab/Kota.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	10.416.325.260	14.181.780.637	(26,55)
Belanja Barang Non Operasional	41.045.373.808	2.298.812.870	1685,5
Belanja Barang Persediaan	24.613.125	21.575.150	14,08
Belanja Jasa	16.844.457.045	5.170.988.824	225,75
Belanja Pemeliharaan	1.877.321.407	979.909.171	91,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	47.377.488.713	15.224.910.595	211,18
Jumlah Belanja Kotor	117.585.579.358	37.877.977.247	210,43
Pengembalian Belanja	(237.602.320)	(6.198.582)	3733,17
Jumlah Belanja	117.347.977.038	37.871.778.665	209,86

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.347.977.038 dipergunakan untuk:

1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
3. Laporan hasil pencegahan/pengawasan pemilu;
4. Fasilitasi dan pembinaan perencanaan, program, dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu;
5. Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
6. Pengembangan sistem informasi Bawaslu;
7. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
8. Honorarium Pengawas Ad-Hoc;
9. Operasional Pengawas Ad-Hoc;
10. Penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
11. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
12. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta Pemilu;
13. Pengawasan penetapan peserta Pemilu;
14. Penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
15. Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
16. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
17. Pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
18. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses masa kampanye;

19. Pengawasan masa kampanye;
20. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara;
21. Penanganan pelanggaran logistik;
22. Pengawasan logistik;
23. Layanan reformasi kinerja;
24. Layanan hubungan masyarakat dan informasi Bawaslu;
25. Layanan data dan informasi;
26. Layanan BMN;
27. Layanan perkantoran;
28. Layanan perencanaan dan penganggaran;
29. Layanan pemantauan dan evaluasi;
30. Layanan manajemen keuangan;
31. Layanan penyelenggaraan kearsipan;
32. Layanan hukum;
33. Layanan umum;
34. Layanan bantuan hukum; dan
35. Layanan manajemen SDM.

Seluruh realisasi belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember 2023 bersumber dari Anggaran Rupiah Murni (RM).

B.5 Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
Rp1.003.531.804*

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.003.531.804 dan Rp864.106.740. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 641,79% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran Prioritas Nasional untuk Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	725.826.804	864.106.740	(16)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.705.000	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	90.000.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.003.531.804	864.106.740	16,14
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.003.531.804	864.106.740	16,14

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp725.826.804 dan Rp864.106.740. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini digunakan untuk:

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
3. Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	725.826.804	864.106.740	(16)
Jumlah Belanja	725.826.804	864.106.740	(16)

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut

*Tabel Mutasi Pembelian
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	7	20.430.114
3.05.01.04.003	Rak Besi	4	6.745.250
3.05.01.04.004	Rak Kayu	3	5.900.000
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	9.865.791
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	7.716.550
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	27	42.600.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	27	27.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	5	15.950.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	10	63.000.000
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	6.500.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	14.850.000
3.10.01.02.001	Personal Computer	6	96.000.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	11	107.900.000
3.10.01.02.002	Lap Top	18	210.894.099
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Computer)	14	54.475.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Computer)	3	36.000.000
Total		139	725.826.804

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp187.705.000 dan Rp0. Realisasi belanja modal lainnya merupakan renovasi atas Gedung dan Bangunan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.705.000	0	-
Jumlah Belanja	187.705.000	0	-

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp90.000.000 dan Rp0. Realisasi ini digunakan untuk pengembangan website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nomor SPK	Nominal (Rp)
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kota Balikpapan	229/PL.03/KI-08/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Berau	208/PL.03/KI-01/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kota Bontang	162/PL.03/KI-09/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	212/PL.03/KI-02/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	300/PL.03/KI-03/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	101/SPK/PL.03/KI-04/12/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	185/PL.03/KI-02/11/2023	10.000.000
Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Paser	018/SPK/PL.03/KI-05/11/2023	10.000.000

Pengembangan Website Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	0362/PL.03/KI-06/12/2023	10.000.000
Jumlah Belanja		90.000.000

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	90.000.000	0	-
Jumlah Belanja	90.000.000	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp52.771.349*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp52.771.349 dan Rp0. Saldo Kas di Bendahara merupakan kas yang berasal dari Tambahan Uang Persediaan yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp52.771.349. Posisi kas per 31 Desember 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Uang tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Uang di BPP	52.771.349	0
Kuitansi UP belum di-SPM-kan	0	0
Total	52.771.349	0

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp122.776.223.044*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp122.776.223.044 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas dapat dirincikan sebagai berikut

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Pajak belum setor	34.500
2	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	122.776.188.544
Total		122.776.223.044

*Belanja Dibayar
Di Muka
(Prepaid)
Rp431.450.000*

C.3 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp431.450.000 dan Rp437.250.000. Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) sebesar Rp431.450.000 terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kota Balikpapan untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 11 Juli 2023 s.d. 10 Juli 2024 sebesar Rp324.500.000 dan Beban Sewa Gedung Bawaslu Kota Balikpapan untuk 6 (enam) bulan terhitung dari 11 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp162.250.000;
- b. Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 27 Februari 2023 s.d. 27 Februari 2024 sebesar Rp2.831.400.000 dan Beban Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 11 (sebelas) bulan terhitung dari 27 Februari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp2.595.450.000;

- c. Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2024 sebesar Rp36.000.000 dan Beban Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 11 (sebelas) bulan terhitung dari 15 Februari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp33.000.000;
- d. Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 01 Maret 2023 s.d. 01 Maret 2024 sebesar Rp21.000.000 dan Beban Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung dari 01 Maret 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp17.500.000;
- e. Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 08 Februari 2023 s.d. 08 Februari 2024 sebesar Rp23.400.000 dan Beban Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat untuk 11 (sebelas) bulan terhitung dari 08 Februari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp21.450.000;
- f. Sewa Gedung/Kantor Sentra Gakkumdu dan Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 01 Mei 2023 s.d. 01 Mei 2024 sebesar Rp44.400.000 dan Beban Sewa Gedung/Kantor Sentra Gakkumdu dan Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu untuk 8 (delapan) bulan terhitung dari 01 Mei 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp29.600.000;
- g. Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu dan Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 01 Mei 2023 s.d. 01 Mei 2024 sebesar Rp30.000.000 dan Beban Sewa Gedung/Kantor Sentra Gakkumdu dan Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten

Mahakam Ulu untuk 8 (delapan) bulan terhitung dari 01 Mei 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000.

TP/TGR

Rp406.869.509

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp406.869.509 dan Rp408.869.509. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut merupakan temuan sisa dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda per 31 Desember 2023 senilai Rp406.869.509.

Mutasi kurang Aset Lain-Lain berupa Jurnal Balik atas Setoran atau Tindak Lanjut Pengembalian Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	NTPN/No.STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	03-Jan-2023	2.000.000
Total				2.000.000

Penyisihan

Piutang-TP/TGR

Rp2.024.348

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.034.348. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian

kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

TP/TGR (Netto)
Rp404.845.161

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp404.835.161. Piutang tagihan TP adalah Piutang yang timbul dari akibat tuntutan yang dikenakan Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. TP dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp404.835.161 merupakan hasil dari nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp406.869.509 dikurangi nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp2.034.348.

Persediaan
Rp1.286.676.600

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.286.676.600 dan Rp6.169.875. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Rincian Persediaan

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	1.286.676.600	5.409.875
Persediaan Lainnya	0	760.000
Jumlah	1.286.676.600	6.169.875

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nominal (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	473.650
2	1010301003	Penjepit Kertas	52.025
3	1010301004	Penghapus/Korektor	78.525
4	1010301007	Penggaris	42.875
5	1010301010	Alat Perekat	88.625
6	1010301012	Staples	125.700
7	1010301013	Isi Staples	68.075
8	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	100.125
9	1010302002	Berbagai Kertas	164.125
10	1010304004	Tinta/Toner Printer	2.089.525
11	1010306010	Batu Baterai	68.850
12	1010307006	Atribut	1.283.324.500
Total			1.286.676.000

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Jan 2023	6.169.875
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	24.613.125
Pembelian – Persediaan Lainnya	0
Perolehan Lainnya	1.283.324.500
Jumlah Mutasi Tambah	1.307.937.625
Mutasi Kurang	
Pemakaian – Barang Konsumsi	26.670.900
Pemakaian – Persediaan Lainnya	760.000
Jumlah Mutasi Kurang	27.430.900
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.286.676.600

Mutasi transaksi penambahan persediaan berupa pembelian, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Pembelian
Persediaan TA 2023*

No	Kode Barang	Jenis Barang	Kuantitas	Nominal (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	142	2.024.900

2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	4	220.650
3	1010301003	Penjepit Kertas	25	139.250
4	1010301004	Penghapus/Korektor	1	8.600
5	1010301006	Ordner dan Map	371	2.171.550
6	1010301007	Penggaris	5	42.875
7	1010301010	Alat Perekat	26	287.150
8	1010301013	Isi Staples	20	44.500
9	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	12	188.000
10	1010302001	Kertas HVS	113	6.425.575
11	1010302002	Berbagai Kertas	89	5.021.250
12	1010302004	Amplop	20	530.625
13	1010304004	Tinta/Toner Printer	28	3.234.925
14	1010306010	Batu Baterai	134	1.336.400
15	1010309001	Materai	275	2.830.000
16	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5	106.875
Total			1.270	24.613.125

Mutasi transaksi penambahan persediaan berupa perolehan lainnya, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Perolehan Lainnya
Persediaan TA 2023*

No	Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Nominal (Rp)
1010307006 Atribut				
1	000001	Alat Penanda Identitas PTPS Kota Balikpapan	2.047	294.768.000
2	000002	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Berau	807	117.015.000
3	000003	Alat Penanda Identitas PTPS Kota Bontang	532	77.140.000
4	000004	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Kubar	532	77.140.000
5	000005	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Kukar	2.269	329.005.000

6	000006	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Kutim	1.185	170.640.000
7	000007	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Mahulu	118	17.100.000
8	000008	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. Paser	846	122.458.500
9	000009	Alat Penanda Identitas PTPS Kab. PPU	542	78.048.000
Total			8.878	1.283.324.500

Mutasi transaksi pengurangan persediaan berupa pemakaian, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Pemakaian
Persediaan TA 2023*

No	Kode Barang	Jenis Barang	Kuantitas	Nominal (Rp)
117111 Barang Konsumsi				
1	1010301001	Alat Tulis	185	2.472.225
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	4	220.650
3	1010301003	Penjepit Kertas	22	157.250
4	1010301004	Penghapus/Korektor	7	48.550
5	1010301006	Ordner dan Map	426	2.370.575
6	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	11	95.625
7	1010301010	Alat Perekat	43	472.975
8	1010301012	Staples	3	81.750
9	1010301013	Isi Staples	14	33.300
10	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	16	224.000
11	1010302001	Kertas HVS	113	6.425.575
12	1010302002	Berbagai Kertas	101	5.175.725
13	1010302004	Amplop	24	606.350
14	1010304004	Tinta/Toner Printer	30	2.834.650
15	1010304010	Mouse	1	221.500
16	1010306010	Batu Baterai	137	1.423.325
17	1010309001	Materai	275	2.830.000

18	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40	976.875
117199 Persediaan Lainnya				
1	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	10	760.000
Total			1.462	27.430.900

Tanah
Rp562.424.000

C.8 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp562.424.000 dan Rp0. Saldo Tanah sebesar Rp562.424.000 merupakan merupakan transfer masuk dari Bawaslu Republik Indonesia atas hibah tanah Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peralatan dan Mesin
Rp11.521.222.293

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp11.521.222.293 dan Rp9.870.201.196.

Rincian peralatan dan mesin yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nominal (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	10	225.764.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	398.300.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	10	3.361.800.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	49.384.500
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	2	99.000.000

3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	65	185.457.657
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	54	90.855.250
3.05.01.04.004	Rak Kayu	3	5.900.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	31	58.230.570
3.05.01.04.007	Brandkas	11	50.076.018
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	8.750.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television	12	178.103.591
3.05.01.05.010	White Board	7	8.400.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	11.700.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	33	341.277.924
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	5.000.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	21	34.001.500
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1	5.500.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	105	207.347.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	253	441.600.895
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	585	665.999.452
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	21	54.623.000
3.05.02.01.005	Sice	18	77.609.086
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	10	5.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	31	118.349.987
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	3.795.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C Split	154	539.487.571

3.05.02.04.006	Kipas Angin	3	5.295.000
3.05.02.05.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.002	Televisi	13	125.578.400
3.05.02.06.008	Sound System	15	143.797.117
3.05.02.06.016	Mic Conference	11	107.070.000
3.0502.06.020	Camera Video	1	14.850.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	10	4.950.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	6.971.107
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	16.720.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	6	2.970.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000
3.05.02.06.087	Neon Box	1	2.750.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	20	21.962.432
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	14.650.000
3.06.01.02.043	Stabilizing Amplifier	1	7.976.428
3.06.01.02.128	Camera Digital	11	105.547.112
3.06.01.02.165	Camera Conference	3	42.017.600
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance	10	48.237.500
3.06.03.47.002	Genset	1	13.000.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	10	28.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	189	1.473.675.595
3.10.01.02.002	Lap Top	110	1.078.228.844
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	244	475.498.807

3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal)	46	444.219.050
3.10.02.04.002	Router	2	8.475.000
3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000
3.10.02.04.006	Repeater and Transceiver	2	5.000.000
3.10.02.04.015	Firewall	1	34.500.000
3.10.02.04.026	Access Point	4	4.920.000
Total		2.191	11.521.222.293

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	9.870.201.196
Pembelian	725.826.804
Hibah Masuk	72.217.353
Reklasifikasi Masuk	102.500.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.484.286.891
Transfer Masuk	34.500.000
Jumlah Mutasi Tambah	12.289.532.244
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	665.809.951
Reklasifikasi Keluar	102.500.000
Jumlah Mutasi Kurang	768.309.951
Saldo Per 31 Desember 2023	11.521.222.293
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(9.522.707.216)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.998.515.077

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa pembelian, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Pembelian
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	7	20.430.114
3.05.01.04.003	Rak Besi	4	6.745.250
3.05.01.04.004	Rak Kayu	3	5.900.000

3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	9.865.791
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	7.716.550
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	27	42.600.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	27	27.000.000
3.05.01.01.008	Meja Rapat	5	15.950.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	10	63.000.000
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	6.500.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	14.850.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	6	96.000.000
3.10.01.02.001	P.C. Unit	11	107.900.000
3.10.01.02.002	Lap Top	18	210.894.099
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	54.475.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	36.000.000
Total			725.826.804

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa hibah masuk, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Hibah Masuk
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2	7.026.433
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	3	9.045.842
3.05.01.04.007	Brandkas	1	4.022.218
3.05.02.01.005	Sice	2	9.018.179
3.05.02.04.004	A.C. Split	3	10.539.651
3.05.02.06.008	Sound System	1	2.987.617
3.05.02.06.036	Handy Cam	1	6.971.107
3.10.01.02.001	P.C. Unit	3	21.112.497
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.493.809
Total		17	72.217.353

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa reklasifikasi masuk, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi Masuk
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	6.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	6	96.000.000
Total		7	102.500.000

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan
Penggunaan Aktif
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	1	9.466.000
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	2	99.000.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	2.500.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	5	7.450.000
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	1	1.500.000
3.05.01.04.007	Brandkas	2	7.950.800
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	2	34.850.000
3.05.01.05.010	White Board	1	750.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	12	121.659.999
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	5.180.000
3.05.01.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	7	12.820.000

3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	38	91.104.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	164	142.595.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	4.000.000
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	4	2.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.500.000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	19	59.669.250
3.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.002	Televisi	1	3.500.000
3.05.02.06.008	Sound System	2	22.500.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.875.000
3.05.02.06.020	Camera Video	1	14.850.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.058	Gordiyin/Kray	1	16.720.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	3	1.485.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	4	4.981.216
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	14.650.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.900.000
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	2	9.750.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000
3.10.01.02.001	P.C. Unit	43	291.116.400
3.10.01.02.002	Lap Top	17	140.229.926
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	128	179.215.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	100.630.000
3.10.02.04.002	Router	1	2.475.000
3.10.02.04.006	Repeater and Transceiver	1	2.500.000
Total		519	1.484.286.891

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa transfer masuk, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Transfer Masuk
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.10.02.04.015	Firewall	1	34.500.000
Total		1	34.500.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa penghentian aset dari penggunaan, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Penghentian Aset dari Penggunaan
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	19.000.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	1	2.450.000
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	14.850.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	6	61.010.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2.590.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	3	4.950.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	22.324.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	75	56.128.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	4.000.000
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	4	2.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.500.000

3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	9	29.789.250
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.008	Sound System	2	22.500.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.875.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	2	990.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	4	4.981.216
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.900.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	2	9.750.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000
3.10.01.02.001	P.C. Unit	27	178.860.000
3.10.01.02.002	Lap Top	7	46.204.485
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	74.537.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	54.961.000
Total		247	665.809.951

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa reklasifikasi keluar, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi Keluar
Peralatan dan Mesin TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6.500.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	96.000.000
Total		102.500.000

*Gedung dan
Bangunan
Rp895.705.000*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp895.705.000 dan

Rp0. Gedung dan Bangunan senilai Rp895.705.000 merupakan transfer masuk dari Bawaslu Republik Indonesia atas hibah bangunan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp708.000.000 dan koreksi susulan atas kesalahan pada pencatatan kode barang yang seharusnya Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tercatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp187.705.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	0
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	708.000.000
Koreksi Susulan	187.705.000
Jumlah Mutasi Tambah	895.705.000
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	895.705.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(58.658.333)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	837.046.667

*Jalan, Jaringan,
dan Irigasi
Rp30.500.000*

C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.000 dan Rp30.500.000. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	22.500.000
Instalasi Lain-lain	8.000.000
Total	30.500.000

Instalasi Lain-Lain merupakan Aset berupa instalasi jaringan internet yang perolehannya berasal dari transfer masuk dari pusat. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	30.500.000
---	-------------------

Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	30.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13.343.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.156.250

*Aset Tetap
Lainnya
Rp199.033.900*

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp199.033.900 dan Rp199.033.900. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebagaimana rincian berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	199.033.900
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	199.033.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	199.033.900

*Akumulasi
Penyusutan
Rp9.594.709.299*

C.13 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp9.594.709.299 dan Rp7.673.355.256. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.522.707.216	7.661.107.339
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.658.333	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.343.750	12.247.917

Total	9.594.709.299	7.673.355.256
--------------	----------------------	----------------------

Rincian akumulasi penyusutan untuk masing-masing barang adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Akumulasi Penyusutan (Rp)
132111 Peralatan dan Mesin		
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	189.556.579
3.02.01.01.003	Station Wagon	312.950.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	2.761.014.287
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	49.384.500
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	93.300.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	156.149.414
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	85.259.050
3.05.01.04.004	Rak Kayu	980.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	49.616.162
3.05.01.04.007	Brandkas	47.260.466
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	8.750.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television	164.251.178
3.05.01.05.010	White Board	8.400.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	11.700.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	246.779.685
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	5.000.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	21.870.600
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	3.300.000

3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	207.347.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	404.232.267
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	607.651.572
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	44.123.000
3.05.02.01.005	Sice	54.219.090
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	5.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	71.915.007
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3.500.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	3.795.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C Split	457.358.867
3.05.02.04.006	Kipas Angin	3.177.000
3.05.02.05.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	460.000
3.05.02.06.002	Televisi	53.731.360
3.05.02.06.008	Sound System	121.571.336
3.05.02.06.016	Mic Conference	97.732.500
3.0502.06.020	Camera Video	14.850.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	4.950.000
3.05.02.06.031	Pataka	8.910.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	2.091.333
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	16.720.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	2.970.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	300.000
3.05.02.06.087	Neon Box	1.650.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12.870.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	20.173.704
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	14.650.000
3.06.01.02.043	Stabilizing Amplifier	5.583.501
3.06.01.02.128	Camera Digital	101.601.170

3.06.01.02.165	Camera Conference	27.440.280
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	5.000.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1.884.300
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance	45.902.500
3.06.03.47.002	Genset	4.550.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	22.800.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	1.245.765.456
3.10.01.02.002	Lap Top	799.951.449
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	393.182.928
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal)	375.942.175
3.10.02.04.002	Router	8.475.000
3.10.02.04.003	Hub	1.485.000
3.10.02.04.006	Repeater and Transceiver	5.000.000
3.10.02.04.015	Firewall	4.312.500
3.10.02.04.026	Access Point	4.920.000
Total		9.522.707.216
133111 Gedung dan Bangunan		
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	58.658.333
Total		58.658.333
134113 Jaringan		
5.03.06.01.002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapaitas Sedang	5.343.750
5.03.10.01.999	Instalasi Lain-Lain	8.000.000
Total		13.343.750

*Aset Tak
Berwujud
Rp438.664.000*

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp438.664.000 dan Rp294.339.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian aset tak berwujud yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	438.664.000
Total		438.664.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	294.339.000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	90.000.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	54.325.000
Jumlah Mutasi Tambah	144.325.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Saldo Per 31 Desember 2023	438.664.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(423.984.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	14.680.000

Aset Lain-lain
Rp0

C.15 Aset lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp0 dan Rp872.801.940. Aset lain-lain ini terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, belum dilakukan usulan penghapusan dan usulan pemindahtanganan atas BMN yang dihentikan penggunaannya.

Rincian dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	818.476.940
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	54.325.000
Total	0	872.801.940

Mutasi transaksi terhadap Aset lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	818.476.940
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	665.809.951
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.538.611.891
Saldo per 31 Desember 2023	0

Mutasi transaksi penambahan aset lain-lain berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	19.000.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	1	2.450.000
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	14.850.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	6	61.010.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2.590.000

3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	3	4.950.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	22.324.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	75	56.128.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	4.000.000
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	4	2.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.500.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	9	29.789.250
3.05.02.05.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.008	Sound System	2	22.500.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.875.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	2	990.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	4	4.981.216
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.900.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	2	9.750.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000
3.10.01.02.001	P.C. Unit	27	178.860.000
3.10.01.02.002	Lap Top	7	46.204.485
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	74.537.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	54.961.000
Total		247	665.809.951

Mutasi transaksi pengurangan aset lain-lain berupa reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
TA 2023*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	1	9.466.000
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000

3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	2	99.000.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	2.500.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	5	7.450.000
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	1	1.500.000
3.05.01.04.007	Brandkas	2	7.950.000
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	2	34.850.000
3.05.01.05.010	White Board	1	750.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	12	121.659.999
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	5.180.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	7	12.820.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	38	91.104.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	164	142.595.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	4.000.000
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	4	2.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.500.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	19	59.669.250
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.002	Televisi	1	3.500.000
3.05.02.06.008	Sound System	2	22.500.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.875.000
3.05.02.06.020	Camera Video	1	14.850.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	16.720.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	3	1.485.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	4	4.981.216
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	14.650.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.900.000

*Akumulasi
Penyusutan dan
Aset Lainnya
Rp423.984.000*

3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	2	9.750.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000
3.10.01.02.001	P.C. Unit	43	291.116.400
3.10.01.02.002	Lap Top	17	140.229.926
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	128	179.215.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	100.630.000
3.10.02.04.002	Router	1	2.475.000
3.10.02.04.006	Repeater and Transciever	1	2.500.000
8.01.01.01.001	Software Komputer	2	54.325.000
Total		521	1.538.611.891

C.16 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp423.984.000 dan Rp1.105.009.849. Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
A. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	(806.419.014)
Jumlah	0	(806.419.014)
B. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		
Akumulasi Amortisasi Software	(369.659.000)	(244.265.835)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(54.325.000)	(54.325.000)
Jumlah	(423.984.000)	(298.590.835)
Total Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(423.984.000)	(1.105.009.849)

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp19.681.877

C.17 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.681.877 dan Rp25.096.383. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	10.415.700
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	19.681.877	14.680.683
Total	19.681.877	25.096.383

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp19.681.877 merupakan pembayaran tagihan listrik dan air untuk bulan Desember 2023 yang tagihannya baru muncul di bulan Januari 2024. Rincian belanja barang yang masih harus dibayar terlampir pada Form Daftar Utang Pihak Ketiga/Tunggakan Tahun Anggaran 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp52.771.349

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp52.771.349 dan Rp0. Yang dimaksud uang muka dari KPPN adalah sisa Tambahan Uang

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp34.500

Persediaan yang tidak digunakan namun belum disetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp52.771.349.

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp34.500 dan Rp0. Yang dimaksud utang jangka pendek lainnya adalah utang pajak bendahara yang belum disetorkan.

Ekuitas
Rp128.508.324.322

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.508.324.322 dan Rp3.313.659.584. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp128.580.812.048, dan kewajiban sebesar Rp72.487.726. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.267.267

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.267.267 dan Rp120.547. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis Pendapatan	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	1.267.267	120.547	
Jumlah	1.267.267	120.547	

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.267.267 merupakan pendapatan jasa giro rekening dana

pemilu Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Kalimantan Timur periode Februari s.d. Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Februari 2023	27/03/2023	431EE48VV5A6E340	17.469
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Maret 2023	29/03/2023	DA28348VV5A8LOLU	147.846
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Februari 2023	24/03/2023	5C77B1JNFLIU6DMR	27.416
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kota Bontang Bulan Maret 2023	21/07/2023	AD19B61QUQQK7Q24	7.595
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Februari s.d. Maret 2023	26/09/2023	9F7F93CIFB9KBPQH	343.416
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Paser Bulan Februari s.d Maret 2023	26/09/2023	EB7417QLUG5IANHE	38.147
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Bulan Maret 2023	25/09/2023	02BC28N3EANUPC73	40.163

Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Berau periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7BD021JNFMDUV89T	184.484
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kota Bontang periode Februari s.d. November 2023	29/12/2023	6408C8N3EB1021FR	3.384
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Kutai Barat periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7AF9C0N9VRRII9O4	347.219
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Kutai Kartanegara periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	4E1398N3EB114JT3	59.763
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Paser periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	6A8167QLUGEJLJL0	50.365
Total			1.267.267

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp8.698.974.660

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.698.974.660 dan Rp9.340.898.880. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan Beban Pegawai sebesar 6,87% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Penurunan beban pegawai disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai yang dimutasi ke unit kerja lain; dan
2. Terdapat pengembalian pegawai Pemda yang dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	974.780.820	986.048.754	(1,14)
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.994	17.369	(2,16)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33.236.990	36.398.858	(8,69)
Beban Tunj. Anak PNS	7.114.602	8.984.582	(20,81)
Beban Tunj. Struktural PNS	65.310.000	94.710.000	(31,04)
Beban Tunj. Fungsional	35.560.000	22.484.000	58,16
Beban Tunj. PPh PNS	67.654.300	130.059.633	(47,98)
Beban Tunj. Beras PNS	38.165.340	44.031.360	(13,32)
Beban Uang Makan PNS	166.098.000	243.810.500	(31,87)
Beban Tunjangan Umum PNS	48.450.000	58.005.000	(16,47)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.053.248.700	6.599.006.700	(8,27)
Beban Gaji Pokok PPPK	23.732.000	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	160	-	-

Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.373.200	-	-
Beban Tunj. Anak PPPK	237.320	-	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	4.320.000	-	-
Beban Tunj. Beras PPPK	1.448.400	-	-
Beban Uang Makan PPPK	2.886.000	-	-
Beban Uang Lembur	36.817.000	34.509.000	6,69
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.116.123.044	1.092.936.580	2,12
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	23.341.362	-	-
Jumlah Beban Kotor	8.700.914.232	9.351.002.336	(7,58)
Pengembalian Beban Pegawai	(1.939.572)	(10.103.456)	(80,80)
Jumlah Beban Pegawai	8.698.974.660	9.340.898.880	(7,5)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja pegawai dibandingkan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2023. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi tambah	
Belanja Pegawai (LRA)	8.709.390.360
Jumlah Mutasi tambah	8.709.390.360
Mutasi Kurang	
Jurnal Kekurangan Uang Kehormatan	10.415.700
Jumlah Mutasi Kurang	10.415.700
Jumlah Beban Pegawai per 31 Des 2023	8.698.974.660

*Beban Persediaan
Rp27.430.900*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.430.900 dan Rp33.355.025. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar 17,76% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penurunan pemakaian barang persediaan konsumsi.

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	26.670.900	30.223.025	(11,75)
Beban Persediaan Lainnya	760.000	3.132.000	(75,73)
Jumlah	27.430.900	33.355.025	(17,76)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2023. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Saldo Awal	
Barang Konsumsi	5.409.875
Persediaan Lainnya	760.000
Mutasi Tambah:	
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	24.613.125
Perolehan Lainnya	1.283.324.500
Jumlah Mutasi Tambah	1.307.937.625
Mutasi Kurang	
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2023	
1. Barang Konsumsi	1.286.676.600
2. Persediaan Lainnya	0
Jumlah Mutasi Kurang	1.286.676.600
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023	27.430.900

*Beban Barang
dan Jasa
Rp67.005.614.996*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.005.614.996 dan Rp21.369.424.378. Beban Barang dan

Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terjadi kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 213,56% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kenaikan terjadi karena terdapat tahapan Pemilu 2024 sudah padat pada tahun ini, selain itu terdapat Dana Tahapan Pemilu Ad Hoc yang disalurkan melalui Rekening Dana Pemilu pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat dana tersebut.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada beban peralatan dan mesin - ekstrakomptabel yaitu sebesar 6591,59%, hal tersebut terjadi karena terdapat penggunaan kembali BMN yang sebelumnya dihentikan penggunaannya. Selain itu kenaikan beban barang dan jasa terjadi karena tahapan Pemilu 2024 sudah padat pada tahun ini, selain itu terdapat realisasi honorarium pokja antara lain honorarium pokja Gakkumdu yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2023, honorarium pokja rekrutmen panwascom, dan adanya realisasi honorarium pokja PPID pada Bawaslu Kab/Kota.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	9.585.950.260	13.150.307.141	(27,10)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104.000	1.950.075	(94,67)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	626.420.000	466.320.000	34,33
Beban Barang Operasional Lainnya	203.496.000	292.712.955	(30,48)

Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19	0	270.845.466	(100)
Beban Bahan	5.234.254.308	1.206.207.870	333,94
Beban Honor Output Kegiatan	34.487.195.000	1.083.070.000	3094,21
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.800.000	9.000.000	(46,67)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	35.800.000	535.000	6591,59
Beban Langganan Listrik	742.860.596	400.966.874	85,27
Beban Langganan Telepon	0	13.920.000	(100)
Beban Langganan Air	208.631.673	64.021.359	225,50
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.774.448	396.076	1082,74
Beban Sewa	15.668.946.520	4.137.831.000	278,68
Beban Jasa Profesi	231.400.000	273.200.000	(15,30)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	6.019.496	0	-
Jumlah Beban Kotor	67.039.652.303	21.371.283.816	213,69
Pengembalian Beban	(34.037.307)	(1.859.438)	1730,52
Jumlah Beban Barang dan Jasa	67.005.614.996	21.369.424.378	213,56

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2023. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	68.272.118.806
Mutasi Tambah	
Belanja Barang dan Jasa yang Masih Harus Dibayar	19.681.877
Beban Sewa dari Sewa Tahun yang Lalu	437.250.000
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	6.019.496
Jumlah Mutasi Tambah	68.735.070.179
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Beban Tahun yang Lalu	14.680.683
Jurnal Koreksi atas Pencatatan Persediaan berupa Penanda Identitas PTPS	1.283.324.500
Belanja Barang Dibayar di Muka	431.450.000
Jumlah Mutasi Kurang	1.729.455.183
Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2023	67.005.614.996

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.875.870.407*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.875.870.407 dan Rp979.909.171. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan Beban Pemeliharaan sebesar 91,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kenaikan terdapat pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 142,94% yang dikarenakan penambahan anggaran pemeliharaan dan kenaikan belanja pemeliharaan mengikuti harga wajar pasar. Rincian beban pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259.476.700	313.951.516	(17,35)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(1.000.000)	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.617.844.707	665.957.655	142,94
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(451.000)	0	-
Jumlah	1.875.870.407	979.909.171	91,58

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023,

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp47.175.374.700*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.175.374.700 dan Rp15.220.571.451. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 209,94%, kenaikan paling signifikan terjadi pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yaitu sebesar 1501,46%, hal tersebut dikarenakan meningkatnya ketersediaan anggaran perjalanan dinas, dan tahapan Pemilu 2024 sudah padat pada tahun 2023 ini. Selain itu, kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan adanya pelaksanaan perjalanan dinas bagi pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa yang tidak terdapat pada Tahun 2022.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.198.145.239	9.523.532.097	112,09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.996.779.534	1.435.988.663	1501,46
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.887.513.800	3.959.536.240	(1,82)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295.050.140	305.853.595	(3,53)
Jumlah Beban Kotor	47.377.488.713	15.224.910.595	211,18

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(202.114.013)	(4.339.144)	4557,92
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	47.175.374.700	15.220.571.451	209,94

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023.

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp1.182.981.300

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.182.981.300 dan Rp1.347.248.640. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.029.829.062	1.207.426.358	(14,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.098.333	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.095.833	1.095.833	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	17.564.907	47.391.616	(62,94)
Jumlah Penyusutan	1.075.588.135	1.255.913.807	(15,79)

Beban Amortisasi Software	125.393.165	91.334.833	37,29
Jumlah Amortisasi	125.393.165	91.334.833	37,29
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	1.182.981.300	1.347.248.640	(12,19)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp10.000)*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp10.000) dan (Rp37.500). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar (Rp10.000) merupakan selisih dari beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2022 sebesar Rp2.044.348 atas nilai piutang sebesar Rp408.869.509 dengan beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2023 sebesar Rp2.034.348 atas nilai piutang Rp406.869.509.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp5.978.130*

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.978.130 dan Rp8.133.289. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Des 2023	Realisasi 31 Des 2022	Naik (Turun) %
---------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.978.130	8.133.289	(26,5)
Jumlah Pendapatan	5.978.130	8.133.289	(26,5)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.978.130	8.133.289	(26,5)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp5.978.130 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp552.088 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2022	27/07/2023	594FD3CIFB3MK00R	Rp351.200
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	473FF2G4VGH6VI4	Rp200.088
Total				Rp552.088

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp5.426.042 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
1.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Putusan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 15 September 2022	09/02/2023	A2A1F1JNFFVA3D	57.500

2.	Pengembalian Kelebihan Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 22 September 2022	09/02/2023	CE16E8N3EA2J7AE9	72.500
3.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Memberikan Sambutan Pelantikan Panwaslucam se-Kabupaten Berau tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	8DFF50N9VQQB9TOO	300.000
4.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Rapat Evaluasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 di Manado a.n. Wamustofa Hamzah	17/01/2023	337016U8EKR253RB	555.500
5.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Monitoring Tahap Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di PPU tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	C3CD57QLUFDEHVI6	787.000
6.	Pengembalian Perjadin Menghadiri Undangan RI tanggal 28 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Galeh Akbar Tanjung	17/01/2023	9D66855DEVM9B063	328.542
7.	Pengembalian Perjadin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 29 Desember 2022	17/01/2023	6F4573CIFAHGH4DL	399.700

	a.n. Anna Siswanti Rahayu			
8.	Pengembalian Perjadin Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 17 s.d. 20 November 2022 a.n. Akhmad Rifani	17/01/2023	48F7B8N3E9VQUEV9	135.000
9.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Nadirah	17/01/2023	5DA6161QUQ8LNB5U	15.000
10.	Pengembalian Uang Perjadin TUP 2 Tahun 2022 a.n. AIPTU M. Daud (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	7CCA62G4VfV43AC6	1.280.000
11.	Pengembalian Perjadin LS TA. 2022 a.n. Muhtar Kusuma Atmaja (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	812D96U8EKR2529B	250.000
12.	Pengembalian Insentif Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	4FD096U8ELD87U9B	157.300
13.	Pengembalian Tahap 5 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	13/09/2023	D895648VV5RKVGBA	1.088.000
Total				5.426.042

Pos Luar Biasa

Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

Rp126.228.181.566

D.11 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp126.228.181.566 dan Rp48.283.116.209.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.313.659.584

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp3.313.659.584 dan Rp3.672.742.759.

Defisit LO

Rp125.958.991.566

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125.958.991.566 dan Rp48.283.116.209. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah /

Mengurangi Ekuitas

Rp9.786.894

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.786.894 dan Rp7.500.000, yaitu sebagai berikut:

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp7.786.894*

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.786.894 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas transaksi hibah masuk yang terbentuk melalui sistem pada aplikasi SAKTI Modul Aset, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nominal (Rp)
1	3050204004	A.C. Split	1.053.966
2	3050206008	Sound System	298.762
3	3100102001	P.C Unit	2.639.061
4	3050201005	Sice	901.818
5	3050104007	Brandkas	402.222
6	3050104001	Lemari Besi/Metal	702.644
7	3050104005	Filing Cabinet Besi	904.584
8	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	186.726
9	3050206036	Handy Cam	697.111
Total			7.786.894

*Koreksi Lain Lain
Rp2.000.000*

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan Rp7.500.000. Koreksi lain-lain tersebut merupakan pengembalian dana hibah ke kas

daerah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Samarinda TA 2015 sebesar Rp2.000.000 dari total keseluruhan senilai Rp448.469.509 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	NTPN/No. STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	03 Jan 2023	2.000.000
Total				2.000.000

Transaksi Antar Entitas Rp251.163.443.198

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp251.163.443.198 dan Rp47.931.533.034. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	127.060.899.202
Diterima dari Entitas Lain	(7.245.397)
Transfer Masuk	1.255.364.000
Pengesahan Hibah Langsung	122.776.188.544
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	78.236.849
Jumlah	251.163.443.198

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp7.245.397 sedangkan DKEL sebesar Rp127.060.899.202.

DDEL sebesar Rp7.245.397 ini terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan Jasa Giro	1.267.267
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	552.088
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.426.042
Total	7.245.397

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.267.267 merupakan pendapatan jasa giro rekening dana pemilu yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Februari 2023	27/03/2023	431EE48VV5A6E340	17.469
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kutai Kartanegara Maret 2023	29/03/2023	DA28348VV5A8LOLU	147.846
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Februari 2023	24/03/2023	5C77B1JNFLIU6DMR	27.416

Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kota Bontang Bulan Maret 2023	21/07/2023	AD19B61QUQQK7Q24	7.595
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Bulan Februari s.d. Maret 2023	26/09/2023	9F7F93CIFB9KBPQH	343.416
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Paser Bulan Februari s.d Maret 2023	26/09/2023	EB7417QLUG5IANHE	38.147
Setor Jasa Giro RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Bulan Maret 2023	25/09/2023	02BC28N3EANUPC73	40.163
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se- Kabupaten Berau periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7BD021JNFMUV89T	184.484
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se- Kota Bontang periode Februari s.d. November 2023	29/12/2023	6408C8N3EB1021FR	3.384
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se- Kabupaten Kutai Barat periode Februari s.d. Desember 2023	31/12/2023	7AF9C0N9VRRRI904	347.219
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se- Kabupaten Kutai Kartanegara periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	4E1398N3EB114JT3	59.763

Setor Jasa Giro Rekening Panwascom se-Kabupaten Paser periode Februari s.d. Desember 2023	29/12/2023	6A8167QLUGEJLJLO	50.365
Total			1.267.267

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp552.088 terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2022	27/07/2023	594FD3CIFB3MK00R	351.200
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	473FF2G4VGHA6VI4	200.088
Total				552.088

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
1.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Putusan Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 15 September 2022	09/02/2023	A2A1F1JNFLFFVA3D	57.500

2.	Pengembalian Kelebihan Snack dan Konsumsi "Rapat Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur" tanggal 22 September 2022	09/02/2023	CE16E8N3EA2J7AE9	72.500
3.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Memberikan Sambutan Pelantikan Panwaslucam se-Kabupaten Berau tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	8DFF50N9VQQB9TOO	300.000
4.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Rapat Evaluasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 di Manado a.n. Wamustofa Hamzah	17/01/2023	337016U8EKR253RB	555.500
5.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Monitoring Tahap Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di PPU tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022 a.n. Hari Dermanto	17/01/2023	C3CD57QLUFDEHVI6	787.000
6.	Pengembalian Perjadin Menghadiri Undangan RI tanggal 28 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Galeh Akbar Tanjung	17/01/2023	9D66855DEVM9B063	328.542

7.	Pengembalian Perjadin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 29 Desember 2022 a.n. Anna Siswanti Rahayu	17/01/2023	6F4573CIFAHGH4DL	399.700
8.	Pengembalian Perjadin Sosialisasi Pengawasan Partisipatif tanggal 17 s.d. 20 November 2022 a.n. Akhmad Rifani	17/01/2023	48F7B8N3E9VQUEV9	135.000
9.	Pengembalian Perjadin dalam rangka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022 a.n. Nadirah	17/01/2023	5DA6161QUQ8LNB5U	15.000
10.	Pengembalian Uang Perjadin TUP 2 Tahun 2022 a.n. AIPTU M. Daud (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	7CCA62G4VJV43AC6	1.280.000
11.	Pengembalian Perjadin LS TA. 2022 a.n. Muhtar Kusuma Atmaja (Bawaslu Kubar)	20/01/2023	812D96U8EKR2529B	250.000
12.	Pengembalian Insentif Kinerja Bulan Desember 2022	27/07/2023	4FD096U8ELD87U9B	157.300

*Kenaikan
Ekuitas
Rp125.194.664.738*

13.	Pengembalian Tahap 5 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	13/09/2023	D895648VV5RKVGBA	1.088.000
Total				5.426.042

DKEL sebesar Rp127.060.899.202 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai	8.709.390.360
Belanja Barang	117.347.977.039
Belanja Modal	1.003.531.804
Jumlah	127.060.899.202

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125.194.664.738 (Rp359.083.175).

Rincian Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Surplus/Defisit LO	(125.958.991.566)	(48.283.116.209)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(9.786.894)	(7.500.000)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(7.786.894)	-
Koreksi Lain-Lain	(2.000.000)	(7.500.000)
Transaksi Antar Entitas	251.163.443.198	47.931.533.034
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	125.194.664.738	(359.083.175)

*Ekuitas Akhir**Rp128.508.324.322***E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.508.324.322 dan Rp3.313.659.584.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp3.313.659.584 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp125.194.664.738.

F. Pengungkapan Penting Lainnya**F.1 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian dan kelompok jabatan fungsional. Per 31 Desember 2023 telah diisi 3 (tiga) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional.

Sampai dengan bulan Desember 2023, telah dilantik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1.	Muhammad Teguh Adiguna Weynand, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	150/KP.04/SJ/04/2023
2.	Dyah Ayu Satriawi, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	150/KP.04/SJ/04/2023
3.	Siti Fazria Endang Salzabila, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	150/KP.04/SJ/04/2023
4.	Andi Tinah Herlina, S.Sos.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	472/KP.04.00/SJ/12/2023

F.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Yusuf, S.Si., M.A.

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Bontang	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos.	Lely Febriyanti, S.H.	0001/HK.01.01/KI/01/2023	02 Januari 2023
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bontang	Raden Dion Erik Perdata, A.Md.	Siti Fazria Endang Salzabila, A.Md.Ak.	0001/HK.01.01/KI/01/2023	02 Januari 2023
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Bunga Warna, S.E.	Yudhi Kusnadi	0135/KP.04.00/KI/03/2022	14 Maret 2023
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Mulyadi	Sugiarni Minde, A.Md.	0196/KP.04.00/KI/06/2023	05 Juni 2023
5.	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Hernilawati, S.Hut.	Ahmad Firdaus, S.TP., M.E.	0393/KU.01.00/09/2023	04 September 2023
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu	Fahmi Wahyudi	Saili Ulfa Nudiya, S.Si.	0252/KP.04/KI/09/2023	19 September 2023

	Kabupaten Kutai Kartanegara				
7.	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Bontang	Lely Febriyanti, S.H.	Ridho Wirawan, S.IP	0422/KU.01.00/KI/10/2023	02 Oktober 2023

F.3 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengelola rekening yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran, yaitu rupiah murni dan hibah dalam negeri.

Rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2023 adalah *virtual account* yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni, dengan rincian terlampir:

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Mandiri	BPG 046 BAWASLU PROV KALTIM	810012684171000
RM Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KAB BERAU	810012684171002
RM Bawaslu Kabupaten Bontang	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BONTANG	8100126864171003
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUBAR	8100126864171004
RM Bawaslu Kutai Kartanegara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUKAR	8100126664171005
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUTIM	8100126864171006
RM Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Mandiri	BP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171007
RM Bawaslu Kabupaten Paser	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PASER	8100126864171008
RM Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BALIKPAPAN	8100126864171001
RM Bawaslu Kota Penajam Paser Utara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PPU	8100126864171009
RDP Bawaslu Kota Balikpapan	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	063001001274304
RDP Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	021301001662307
RDP Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	033301002447306
RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	062601001115307

RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	021201003816306
RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	056301001742300
RDP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	062601001125302
RDP Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	021401002664306
RDP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	BRI	RPL 046 PS BAWASLU PROV KALTIM UNTUK RDP	111301000886305
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	BRI	RPL046 PDHL PIGUB KTM 2KEPZDTA	654286864172401
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	BRI	RPL046 PDH PIGUB KTM 2KEPZDTA	654266864172501
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kota Balikpapan	BRI	RPL046 PDH PIGUB BLP 2KEPZDTA	654266864172502
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDH PIGUB BOTG 2KEPZDTA	654266864172503
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	RPL046 PDH PIGUB BRAU 2KEPZDTA	654266864172504
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTB 2KEPZDTA	654266864172505
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTK 2KEPZDTA	654266864172506
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTI 2KEPZDTA	654266864172507
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDH PIGUB MHUL 2KEPZDTA	654266864172508
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDH PIGUB PASR 2KEPZDTA	654266864172509

Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	BRI	RPL046 PDH PIGUB PPUT 2KEPZDTA	654266864172510
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDHL PIKOT BTG 23K7C6GA	654256864172402
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	RPL046 PDHL PIBUP BRU 231LJM4A	654256864172403
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KUB 2SV6BV2A	654256864172404
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KKN 2Z7NGNZA	654256864172405
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KTM 2N8G14XA	654256864172406
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDHL PIBUP MHU 282ATB3A	654256864172407
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDHL PIBUP PSR 2DWMMBEA	654256864172408
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	RPL046 PDHL PILKOT BLKPPN 2G8EM8KA	8100126864172401
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Mandiri	RPL046 PDHL PILBUP PEPASUT 2E9YCRQA	810012684172402
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDH PIKOT BTG 23K7C6GA	654266864172512
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	PL046 PDH PIBUP BRU 231LJM4A	654266864172513
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDH PIBUP KUB 2SV6BV2A	654266864172514
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDH PIBUP KKN 2Z7NGNZA	654266864172515
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDH PIBUP KTM 2N8G14XA	654266864172516
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDH PIBUP MHU 282ATB3A	654266864172517
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDH PIBUP PSR 2DWMMBEA	654266864172518

Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	RPL046 PDH PILKOT BLKPPN 2G8EM8KA	8100126864172501
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Mandiri	RPL046 PDH PILBUP PEPASUT 2E9YCRQA	8100126864172502

F.4 Pelaksanaan Program Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Nasional Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Badan Pengawas Pemilu merupakan pelaksana pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan Program Prioritas Nasional. Hal ini tercermin pula pada anggaran yang ada pada Badan Pengawas Pemilu secara keseluruhan yang bersumber dari APBN. Anggaran Program Prioritas Nasional Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	41.780.115.000	35.949.779.604
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	2.363.406.000	2.188.909.500
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	110.000.000	108.560.791
6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	136.209.000	136.134.200
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	30.483.100.000	30.288.325.000
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	20.740.518.000	18.973.095.226
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	77.070.000	6.700.000
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	4.365.996.000	3.179.027.590
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu	17.340.000	16.434.800

6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	73.675.000	68.670.640
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	240.000	0
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	114.910.000	110.326.600
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	617.569.000	142.017.279
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1.291.260.000	953.571.772
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	355.630.000	71.772.470
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	14.279.082.000	7.115.088.204
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	347.365.000	291.880.700
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	224.540.000	52.708.586
6846.QIC.001	Pengawasan Logistik	3.347.322.000	1.396.650.453
TOTAL		120.725.347.000	101.049.653.415

Untuk realisasi kinerja Program Anggaran Prioritas Nasional (PN) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Volume Target	Satuan Target	PCRO	RVRO
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	440	Lembaga	100%	440
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	981	Lembaga	100%	981
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	11	Sistem Informasi	100%	11
6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	6	Laporan	100%	6

6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	1.074	Lembaga	100%	1.074
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	1.282	Lembaga	100%	1.282
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	10	Perkara	100%	10
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.104	Laporan	100%	1.104
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu	2	Perkara	100%	2
6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	7	Laporan	100%	7
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Perkara	100%	1
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	7	Laporan	100%	7
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	30	Perkara	100%	30
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	125	Laporan	100%	125
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	40	Perkara	100%	40
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	1.199	Laporan	100%	1.199
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	483	Laporan	100%	483
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	20	Perkara	100%	20
6846.QIC.001	Pengawasan Logistik	1.199	Laporan	100%	1.199

Per 31 Desember 2023 realisasi atas Program Prioritas Nasional Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp101.049.653.415 atau 83,70% dari total pagu anggaran yang ada pada tahun anggaran 2023.

F.5 Pengungkapan Lainnya (Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada TA. 2015)

Pada tanggal 04—14 September 2023, dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Wilayah III pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan itu pula, tim reviu untuk Bawaslu Kota Samarinda melakukan tindak lanjut atas Sisa Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 a.n. Meity Landemeyke Torar. Pada tanggal 07 September 2023, telah diperbaharui surat pernyataan yang isinya antara lain:

- 1) Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan ke Kas Daerah secara bertahap dengan total senilai Rp41.600.000 pada tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan 03 Januari 2023;
- 2) Jumlah kekurangan atas piutang senilai Rp406.859.509.000 akan diganti dalam jangka waktu 6 bulan (terhitung) dari tanggal 07 September 2023 s.d. 07 Maret 2024 dengan angsuran per bulan minimal Rp2.000.000 yang akan disetorkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima);
- 3) Sebagai jaminan atas pernyataan di atas, Ibu Meity Landemeyke Torar bersedia menyerahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut tanah dengan bukti status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00527, pemegang hak milik Alexander Agustinus Rottie (Suami Ibu Meity Landemeyke Torar) luas 7.321 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) yang berlokasi di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan buku bank BRI dan ATM a.n Meity Landemeyke Torar dengan nomor 7385-01-006266-53-4;
- 4) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah Ibu Meity Landemeyke Torar menandatangani pernyataan tersebut, beliau akan menjual aset yang dijaminan tersebut pada poin nomor 3 (tiga) untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau. Apabila hasil penjualan aset tersebut tidak cukup untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau, maka beliau akan menjual aset lain yang dimiliki sehingga lunas. Ibu Meity Landemeyke

Torar menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

F.6 Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tindak lanjut atas notisi hasil audit kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Pengelolaan Dana APBN Tahun Anggaran 2023 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 disajikan dalam Lampiran terpisah (**Lampiran I**).

F.7 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.